

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja instansi saat ini sedang menarik perhatian dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang sadar dengan pengelolaan administrasi publik saat ini. Para masyarakat menilai bahwa adanya ketidakefisiensian pada pengurusan organisasi sektor publik, serta kerugian pada organisasi tersebut. Pada faktanya organisasi public dimata masyarakat ini adalah organisasi yang pada pelaksanaan perkerjaannya kurang maksimal, kurangnya produktifitas, kualitas pada kinerja yang rendah, dan juga terdapat inefisiensi pada dana yang digunakan. Aktibatnya masyarakat menuntut sebuah keterbukaan yang bersih atas kinerja dalam organisasi sector public ini yang dimana sesuai pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk reformasi kelembagaan dalam menghasilkan good government, ialah sesuatu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada pihak yang dimana pihak tersebut telah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan sumber daya yang berhubungan dengan tanggungjawab serta kesuksesan dari apa yang ia kerjakan. Akuntabilitas saling bertautan dengan aktivitas pemeliharaan terutama bagi tercapainya pelayanan yang baik dan transparan kepada masyarakat. Maka dari itu akuntabilitas ini dapat di artikan sebagai sebuah pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam pemaparan Mardiasmo (2006) bahwa Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Dalam keberlangsungan kegiatan pemerintahan daerah, akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pengurusan dan pengimplementasian suatu pemerintahan otonomi daerah demi

tercapainya hasil yang telah direncanakan yang sesuai dengan ketentuan yang ternilai efektif kualitas dan kuantitasnya. Penyajian dan pelaporan adalah hal yang harus terkandung dalam akuntabilitas. Salah satu yang menjadi utama dalam penyajian dan juga pelaporan ini adalah bagian administrasi keuangan. Pertanggungjawaban dalam akuntabilitas ini bukan hanya mengenai pelaporan dalam pertanggungjawaban saja, akan tetapi seperti kemudahan dalam pemberian amanat dalam memperoleh sebuah informasi secara langsung atau tidak secara perkataan ataupun tulisan juga termasuk kedalam pertanggungjawaban dalam akuntabilitas. Maka akuntabilitas dapat berkembang pada lingkup yang mengedepankan keterbukaan sebagai suatu landasan dalam pertanggungjawaban.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keharusan seseorang dalam organisasi dalam pertanggungjawaban dalam perwujudan kebijakan diikuti dengan pembuktian secara fisik yang terpercaya mencapai rencana sesuai dengan ketentuannya. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah demi mencari suatu pembuktian atas pertanggungjawaban tentang hal-hal yang terjadi dan juga membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Yang dimana jika dalam pertanggungjawaban akuntabilitas itu terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian maka hal tersebut harus segera diuruskan sesuai dengan apa yang seharusnya agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas didalam keuangan daerah adalah proses dari pengelolaan dalam keuangan daerah dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang nantinya dapat dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat dengan hasil yang transparan baik keberhasilan maupun hambatan, dan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. Peran masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah tersebut melainkan masyarakat disini juga dapat berperan untuk menuntut atas pertanggungjawaban pengoperasian dan juga pelaksanaan mengenai penggunaan dana tersebut.

Laporan pertanggungjawaban adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh para pemerintah daerah terhadap apa saja rencana-rencana yang sudah berlangsung

dalam rangka kesejahteraan rakyat yang dimana pelaporan ini harus dilakukan secara terbuka dan juga terjamin ketransparanannya. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk organisasi public terkait yang dimana dapat dijadikan sebuah acuan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kedepan

Didalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fokus utama pada pelaporan ini adalah penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintahan daerah. Titik utama dari akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan ini adalah anggaran yang di gunakan pemerintah daerah, data yang berupa periodic yang disebarluaskan, laporan tahunan dan juga hasil pemeriksaan dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh pihak terkait.

Keuangan mejadi sebuah factor yang penting yang ada didalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya fungsi para pemeritah daerah tanpa biaya yang memadai dalam rangka memberikan sebuah pelayanan yang berjalan dengan optimal bagi masyarakat dalam hal pembangunan. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki keharusan dalam engelolaan keuangan daerah yang baik agar dapat diketahui kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah tersebut dalam pengaturan dan juga pengurus daerahnya masing-masing. Maka dengan terjadinya hal tersebut diperlukan suatu perancangan untuk pelaksanaan keuangan daerah tersebut demi terselenggara dengan baiknya program tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program selama satu periode harus memanfaatkan dan juga pemaksimalan anggaran dalam penganggaran daerah yang telah ditetapkan didalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Keuangan daerah menjadi satu dari faktor terpenting dalam keberlangsungan otonomi daerah, namun walaupun menjadi faktor utama tetap ada point yang menjadi factor lain yang berpengaruh dalam jalannya keuangan daerah, contohnya adalah sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana, dan prasarana serta faktor faktor pendukung lainnya. Pentingnya factor dari keuangan daerah ini

berhubungan dengan fakta bahwa aktivitas pada sumber-sumber keuangan daerah ini dinilai sebagai hal yang paling esensial dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Adanya pengelolaan dalam keuangan daerah bisa memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Keberhasilan pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat melalui bagaimana cara pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Apabila pengelolaan keuangan di daerah tersebut terbilang baik maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan rakyat di daerah tersebut dapat tercapai dengan baik.

Salah satu komponen dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah oleh pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pada rencana pembangunan daerah ini pemerintah daerah merencanakan untuk mengadakan perbaikan dalam pengelolaan di keuangan daerah khususnya pada bagian APBD.

Diperlukan acuan atau standar dalam hal sistem pengelolaan keuangan daerah pada zaman otonomi daerah yang terhubung dengan pengelolaan APBD. Acuan tersebut mengenai kapanakah daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri, dan juga dalam pengelolaannya daerah tersebut efektif, efisien dan juga akuntabel. Maka dari itu pentingnya pengukuran untuk hal kinerja dalam organisasi sector public yang nantinya dapat menjadi suatu acuan ataupun tolak ukur dari penerapan sebuah kebijakan keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja keuangan sendiri berarti kemampuan akan suatu organisasi public dalam penggunaan modal yang dimiliki dengan efektif dan juga efisien. Pengukuran ini juga dapat memperlihatkan bagaimana organisasi tersebut pada pelaksanaannya memiliki kredibilitas yang baik. Dalam hal pengukuran kinerja keuangan. Terdapat beberapa cara dalam melakukan pengukuran keuangan, salah satunya adalah menggunakan konsep *value for money*.

Kinerja adalah suatu hasil dari sebuah kerja yang telah tercapai dalam sebuah rencana yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mencapai suatu sasaran dan target. Sistem dalam pengukuran kinerja di organisasi ini bertujuan untuk membantu para organisasi public untuk melakukan pencapaian suatu rencana strategi dengan menggunakan tolak ukur kinerja yang sudah ditetapkan.

Untuk mencapai suatu pengelolaan keuangan yang baik adalah hal yang penting untuk perkembangan dan juga keberlangsungan organisasi yang dimana hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengukuran perencanaan sampai dengan pelaksanaan tersebut dapat diukur dengan menggunakan *value for money*. Pengertian *value for money* sendiri adalah sebuah prinsip dalam pengelolaan keuangan dalam organisasi public yang berdasarkan pada 3 elemen, ketiga elemen tersebut adalah ekonomi, efisien, dan juga efektivitas.

Berdasarkan pada pemaparan Mardiasmo (2009) bahwa *value for money* adalah suatu konsep dalam pengelolaan di sector organisasi public yang dimana terdapat 3 elemen didalamnya yaitu ekonomis, efisiensi dan juga efektivitas. Ekonomis disini berarti didalam pelaksanaan dan juga pengalokasian sumber daya diupayakan dan juga di maksimalkan untuk hasilnya. (*maximizing benefits and minimizing cost*), dan efektif yang berarti berhasil atau sukses dalam mencapai sasaran atau rencana yang sudah di rencanakan.

Fungsi pengukuran ini sangatlah penting dalam hal menilai sisi akuntabilitas pemerintah daerah didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas ini bukan hanya sekedar kemampuan dalam memperlihatkan proses suatu keuangan public dalam pembelanjaan, namun juga diikuti dengan kemampuan yang memperlihatkan bahwa keuangan public ini sudah terealisasi dengan ekonomis, efektif dan juga efisien.

Pengukuran kinerja didalam system manajemen strategi adalah sebagai alat penilaian untuk mengetahui apakah strategi tersebut sudah berhasil dicapai. Maka dari hasil penilaian tersebut dapat dilakukan penilaian umpan balik yang nantinya akan membuat sebuah system pengukuran kinerja yang dapat memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan pada hal tersebut hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat memperbaiki suatu kinerja didalam organisasi tersebut untuk periode waktu selanjutnya baik dalam hal perencanaan ataupun dalam implementasinya.

Value for money adalah sebuah konsep untuk menilai suatu kinerja keuangan, dikarenakan sebuah pengukuran kinerja keuangan dipakai untuk penilaian bagaimana realisasi dalam alokasi keuangan didalam program yang sudah

direncanakan. Terdapat sekiranya dua indikator dalam *Value for money* yaitu adalah alokasi biaya yang terdiri dari ekonomis dan efisien, dan yang kedua adalah kualitas pelayanan yaitu efektivitas dari pelaksanaan tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut dapat dikatakan bahwa *value for money* dalam penilaiannya di tekankan kepada tiga aspek yaitu ekonomis, efektif dan juga efisien. Pengukuran kinerja adalah salah satu point penting dalam penilaian suatu akuntabilitas didalam sector organisasi public dalam memenuhi pelayanan public yang ternilai baik sehingga dapat mencapai pada point kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan pelaksanaan pengyukuran kinerja keuangan ini didasari oleh beberapa indikator dari sumber daya yang dipakai, hasil yang bernilai bermanfaat bagi para masyarakat, serta terlihat dampak dari program tersebut yang nantinya dapat menghasilkan sebuah akuntabilitas public.

Pertumbuhan ekonomi termasuk kedalam suatu focus terpenting dalam perkembangan suatu perekonomian dari masa ke masa yang mana didalam pertumbuhan tersebut wajar bila terjadi suatu kenaikan dan juga penurunan dalam pelaksanaannya. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestic bruto (PDRB) yang dimana didalam PDRB ini terkandung barang dan jasa yang dimana hal tersebut sangat berperan terhadap hasil kegiatan perekonomian yang dimana hal tersebut mempengaruhi hasil kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestic yang tidak perlu memperhatikan factor produksi yang berasal dari daerah tersebut.

Kabupaten Cianjur memiliki focus pembangunan daerah yang dipusatkan pada sektor pertanian, pariwisata dan juga perdagangan. Kondisi PDRB di Kabupaten Cianjur ini terus meningkat yang dikarenakan penararan Kabupaten Cianjur dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PWK) yang diman pada kaitn dengan Provinsi Jawabarot, Kabupaten Cianjur ini menguhungkan antara Ibukota Negara (Jakarta) dengan Ibukota Provinsi Jawabarot (Bandung) dan juga perihal jarak antar kota lainnya Kabupaten Cianjur ini cenderung berdekatan dengan kabupaten lainnya yaitu Sukabumi, Bogor dan juga Bandung.

Focus utama pembangunan perekonomian Kabupaten Cianjur bukan hanya sekedar berfokus pada bidang pertanian, perdagangan dan juga pariwisata. Namun

pemerintah Kabupaten Cianjur juga memfokuskan perkembangan perekonomian ini didalam pengembangan UMKM yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Cianjur. Dilansir dari pernyataan Kementerian dan UMKM, 2014 peranan UMKM ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan PDRB di Indonesia, karena tercatat bahwa UMKM ini memiliki kontribusi sumbangan terhadap PDRB hingga mencapai 57,84% dan kemudia seiring berjalannya waktu kontribusi tersebut meningkat menjadi 60,34%. Maka dari itu dapat dikatakan perkembangan UMKMK di Indonesia ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dalam hal pengembangan UMKM ini pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperdagin) Kabupaten Cianjur melakukan beberapa rencana dalam rangka pembangunan UMKM di kabupate Cianjur ini. Setidaknya terdapat 32 Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang diberikan pendampingan serta pelatihan oleh Diskoperdagin dalam upaya peningkatan kualitas UMKM tersebut. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur yang memiliki visi untuk meningkatkan daya saing usaha mak Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur ni berperan penting dalam peningkatan serta pengembangan daya saing UMKM baik dari segi pengelolaan program program pengembangan UMKM dan Koperasi serta peningkata SDM pengelolanya.

Proses pengukuran kinerja ini adalah proses yang sangatlah penting dengan tujuan menilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sebuah keuangan. Akuntabilitas bukan hanya sekedar sebuah kemampuan dalam menunjukkan bagaimana proses uang public tersebut untuk dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan feedback sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan feedback (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada

periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2009).

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dalam upaya penapaian target serta tujuan yang telah direncanakan maka disusunla suatu program atau rencana kegiatan dalam upaya penjalanan fungsi selaku organisasi sektor publik yang dalam pelaksanaannya berjalan pada bidang pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur ini menggunakan anggaran keuangan yang telah dirancang dan juga sudah di tujikan untuk program dan juga rencana kegiatan yang sudah direncakan bagi pengembangan UMKM dan Koperasi tersebut. Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur Tahun
2020 - 2021

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	16.466.875.506,-	15.605.420.723,-	94.76%
2021	30.488.613.674,00,-	25.323.899.980,00,-	83.06%

Sumber : LKJIP Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur 2020-2021

Terlihat pada data di atas bahwa realisasi belanja daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa program ataupun kegiatan yang dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan apa yang ada pada rencana anggaran awal. Namun dalam tiap tahunnya ditemukan masih terdapat angka yang belum mencapai presentase realisasi 95% bahkan 100% sehingga dikatakan belum maksimal, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 berkenaan dengan Tata Cara

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa presentase penyerapan anggaran suatu instansi pemerintah dalam satu periode minimal mencapai angka 95%.\

Selanjutnya permasalahan kedua yang ditemukan, peningkatan dalam realisasi belanja daerah tersebut tidak terjadi pula pada belanja langsung langsung Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan, dimana realisasi belanja langsung yang dimiliki cenderung mengalami fluktuatif serta ditemukannya selisih negatif dalam realisasinya. Tertera pada tabel di bawah untuk mengetahui secara jelasnya

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Belanja Langsung Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur Tahun 2020 -
2021

Tahun/Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
Tahun 2020				
• Belanja Pegawai	11.169.716.471,-	10.462.385.676,-	707.330.795,-	93.6%
• Belanja Barang dan Jasa	3.604.671.275,-	3.503.424.313,-	101.246.962,-	97.19%
• Belanja Modal	1.692.487.760,-	1.639.610.734,-	52.877.026,-	96.87%
Total	16.466.875.506,-	15.605.420.723,-	861.464.783,-	94.76%
Tahun 2021				
• Belanja Pegawai	9.004.434.600,-	8.147.413.026,-	857.021.574,-	90.48%
• Belanja Barang dan Jasa	6.763.660.800,-	6.556.852.706,-	206.808.094,-	90.94%
• Belanja Modal	14.230.518.364,-	10.169,671.248,-	4.060.847.116,-	71.46%
Total	29.998.613.764,-	24.873.936.980,-	5.124.676.784,-	82.91%

Sumber : LKJIP Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur 2020-2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja langsung dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yaitu belanja langsung realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun

sebelumnya yaitu terealisasi sebesar 94.76%. Selanjutnya di tahun 2021 realisasi pendapatan menurun kembali menjadi 82.91%. Dari yang dianggarkan serta dapat dikatakan belum maksimal karena masih terdapat anggaran yang belum digunakan minimal 95% sampai 100%.

Selanjutnya dalam realisasi program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur belum terlaksana secara maksimal, karena ditemukannya presentase di bawah angka 80% dalam realisasi program tersebut. Tidak hanya itu, masih terdapat program yang realisasi nya belum mencapai minimal 95% bahkan 100% sesuai dengan PMK Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran dan Realisasi Program Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur Tahun 2020 - 2021

Tabel 1.3

tahun	Jenis belanja	Program	Anggaran	Realisasi	%
2020	Belanja Non Urusan	Perencanaan & Penganggaran	Rp. 71.682.000,-	Rp. 70.933.400,-	95.2%
2021	Belanja Non Urusan	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 11.685.257.800,-	Rp. 10.595.937.162,-	90.68%
	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 16.209.906.114,-	Rp. 12.160.793.168,-	75.02%
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Rp. 721.881.400,-	Rp. 68.440.500,-	93.91%

		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 101.349.45,-	Rp. 93.995.750,-	92.74%
--	--	--	------------------	------------------	--------

Sumber : LKJIP Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur 2020-2021

Jika dilihat pada Tabel 1.1 pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan terhadap realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Tepatnya pada tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan yang cukup pesat pada realisasi anggaran di tahun 2020. Berdasarkan wawancara kepada pihak Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, diketahui bahwa program yang dilaksanakan belum terealisasi dengan maksimal yaitu pada tabel 1.3 yaitu pada bagian belanja urusan pilihan tepatnya pada program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang hanya mencapai 75,02%. Pada program tersebut dinyatakan bahwa pembangunan pasar Ciranjang yang pada tahun 2020 ditargetkan selesai namun pada pengimplementasiannya pembangunan pasar Ciranjang tersebut mendapatkan hambatan yang membuat pembangunan pasar tersebut dilanjutkan ke tahun 2022, hal tersebut membuat realisasi anggaran tidak terealisasi dengan baik dikarenakan anggaran tersebut dipindahkan ketahun selanjutnya yaitu tahun 2022. Penurunan tersebut juga dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik, kurangnya partisipasi sumber daya manusia yang menjadi sasaran, serta pelaksanaan perencanaannya kurang maksimal.

Melihat dari penjelasan di atas semakin meyakinkan penulis untuk menjadikan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur sebagai lokus melakukan penelitian. Adapun pertimbangan penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan kinerja keuangan yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, yaitu sebagai berikut: (1) Realisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, baik dalam belanja daerah, belanja langsung, serta program yang dilaksanakan belum optimal mencapai 100%; (2) Dalam realisasi anggaran belanja langsung Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Cianjur cenderung mengalami fluktuatif; (3) Terdapat realisasi anggaran yang belum mencapai angka 80% dalam program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dimana hal tersebut berbeda dengan pernyataan awal yang diberikan bahwa anggaran yang dimiliki telah digunakan dengan sangat baik sehingga telah mencapai minimal 80%; dan (4) Pada tahun 2020-2021 masih terdapat realisasi anggaran yang belum mencapai anggaran yang dimiliki, dimana penyerapan anggaran tersebut dapat memberikan dua kemungkinan, yakni pertama dapat menunjukkan bahwa realisasi dari anggaran tersebut telah ekonomis, efisien, ataupun efektif sesuai dengan kriteria yang ada

Pemaparan mengenai *value for money* serta permasalahan yang ditemukan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur ini meyakinkan penulis bahwa kinerja keuangan ini menarik untuk dijadikan penelitian dengan menilainya menggunakan konsep *value for money*, dimana selaku organisasi sektor publik, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur perlu melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan konsep *value for money* untuk melihat apakah penggunaan keuangannya sudah ekonomi, efisien, dan efektif atau belum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kinerja keuangan ini menjadi hal yang penting dalam suatu organisasi guna melihat keberhasilan dalam penggunaan keuangannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Value For Money Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur”

1.2 Identifikasi Masalah

Bersandarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur belum optimal.
2. Realisasi belanja pada tahun 2020 – 2021 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur mengalami fluktuatif.

3. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 - 2021 belum terlaksana secara optimal serta dalam realisasinya masih ada yang belum mencapai 80%.
4. Perencanaan yang belum optimal menyebabkan adanya penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

1.3 Rumusan Masalah

Melihat identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Ekonomi pada kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 - 2021?
2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Efisiensi pada kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 - 2021?
3. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Efektivitas pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020- 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Ekonomi pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 – 2021.
2. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Efisiensi pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 – 2021.
3. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Efektivitas pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 – 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diraih dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini dalam kegunaan teoritis yakni berguna sebagai penambahan serta pengembangan keilmuan atau wawasan penulis dan pembaca dalam kajian Administrasi Publik, yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Sektor Publik, utamanya pada kajian kinerja keuangan.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ini diharap dapat mengembangkan pemahaman serta pengetahuan penulis mengenai kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money*, terutama yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.

2) Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharap dapat bermanfaat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur guna menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang dimiliki agar dapat lebih mengoptimalkan nya pada tahun berikutnya.

3) Bagi Peneliti Lain

Adanya penelitian ini diharap mampu dijadikan sebagai sumber informasi serta rujukan pada penelitian yang dilakukan selanjutnya secara lebih luas dan mendalam, utamanya pada bidang yang sama agar dapat dikembangkan dalam hal-hal berkenaan dengan kinerja keuangan.

1.6 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Ekonomi pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 – 2021.
2. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Efisiensi pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 – 2021.
3. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator Efektivitas pada kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tahun 2020 – 2021.

1.6 Kerangka Pemikiran

Fokus pada penelitian ini ialah kinerja keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur dengan menggunakan konsep *value for money*. Menurut Irham Fahmi (2012), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Berkaitan dengan pemerintah daerah, Sumarjo (dalam Wahyudin & Sugianal, 2017) mengartikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”.

Beberapa pengertian di atas menunjukkan kinerja keuangan merupakan salah satu hal penting yang digunakan dalam menentukan penilaian anggaran belanja organisasi sektor publik, apakah dalam penggunaannya telah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya. Oleh sebab itu, adanya pengukuran dalam kinerja keuangan ini sifatnya perlu untuk dilaksanakan, karena keuangan sendiri dapat digunakan untuk melihat maksimalnya penggunaan anggaran yang dimiliki dalam

memberikan pelayanan guna menyejahterakan rakyat untuk mencapai akuntabilitas publik.

Salah satu cara untuk mengetahui jalannya kinerja keuangan telah baik atau belum yakni dengan menerapkan penggunaan *konsep value for money*. Menurut Mahmudi (2015) *value for money* merupakan sebuah penghargaan atas nilai mata uang yang dimiliki. Artinya, angka dari setiap rupiah haruslah dijunjung dengan layak serta digunakan dengan baik dan benar. *Value for money* juga merupakan sebuah kunci dalam mengukur kinerja sektor publik, dimana kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja, tetapi juga nonkeuangan (Mahmudi 2015).

Mardiasmo juga menegaskan bahwa *value for money* ini melihat penggunaan uang publik di suatu organisasi sektor publik ini haruslah merata, tidak ada yang lebih maupun kurang. *Value for money* juga ialah sebuah konsep pengelolaan pada organisasi sektor publik yang melandaskan pada tiga unsur yakni ekonomis, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo 2018).

Penjelasan di atas tersebut selaras dengan permasalahan yang ditemukan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, dimana masih adanya penggunaan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur yang belum optimal karena belum mencapai presentase realisasi 95% sampai 100% serta ditemukannya realisasi yang melebihi pagu anggaran pada akun belanja langsung tahun 2017. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *value for money* yang dikemukakan oleh Mardiasmo, dimana Mardiasmo membagi *value for money* menjadi tiga indikator sebagai berikut (2018).

- 1) Ekonomi
- 2) Efisiensi
- 3) Efektivitas

Berdasarkan indikator *value for money* ini dapat melihat apakah kinerja keuangan yang dimiliki telah ekonomis, efisien, dan efektif. Artinya *value for money* menjadi suatu metode yang tepat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Cianjur melihat dari penggunaan keuangannya, dimana kelak terlihat apakah penggunaannya tersebut sudah dialokasikan dengan baik atau belum.

Bersandarkan pada penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai akuntabilitas publik guna menyejahterakan masyarakat perlu dilakukannya penilaian kinerja keuangan dengan konsep *valor for money* untuk mengetahui pemanfaatan anggaran publik tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum serta sudah ekonomi, efisien, dan efektif atau belum, baik dalam pengalokasian biaya maupun kualitas pelayanan yang dihasilkan. Dengan demikian, penulis menyusun kerangka pemikirannya sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

